



Social Entrepreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Randy Agung Prasetya¹, Iman Santoso²

Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: randyprasetya100@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 Oktober 2025

ABSTRACT

Economic problems are one of the main challenges faced by prisoners during their prison terms, both individually and for the families they leave behind. This study aims to understand the implementation of social entrepreneurship in the economic empowerment of prisoners at the Madiun Class I Correctional Institution and to identify the obstacles faced in its implementation. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques of interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of social entrepreneurship at the Madiun Class I Correctional Institution has a positive impact on the economic empowerment of prisoners through the provision of bonuses, job skills training, and a network that can be utilized after release. These activities also have a social impact in the form of changes in behavior patterns and mindset and foster enthusiasm among inmates. However, obstacles are still encountered, such as a lack of long-term awareness among inmates, a lack of available human resources, difficult equipment maintenance, and a lack of available infrastructure. The implementation of social entrepreneurship-based work activities at Madiun Class 1 Prison has been running well, but evaluation and improvements related to the obstacles faced must be addressed immediately to maximize the output produced.

Keywords: Social entrepreneurship, Economic Empowerment, Correctional Institution

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi narapidana selama menjalani masa pidana, baik secara individu maupun terhadap keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan social entrepreneurship dalam pemberdayaan ekonomi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan social entrepreneurship di Lapas I Madiun memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi narapidana melalui pemberian premi, pelatihan keterampilan kerja, dan jaringan kerja yang dapat dimanfaatkan pasca pembebasan. Kegiatan tersebut juga membawa dampak sosial berupa perubahan pola perilaku, mindset dan menumbuhkan semangat narapidana. Namun demikian, hambatan masih ditemui seperti kurangnya kesadaran narapidana jangka panjang, kurangnya ketersediaan SDM petugas, maintenance alat yang sulit dan kurangnya sarana prasana yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan kerja berbasis social entrepreneurship di Lapas Kelas 1 Madiun telah berjalan dengan baik, namun evaluasi dan perbaikan terkait kendala yang dihadapi harus segera diatasi untuk memaksimalkan output yang dihasilkan

Kata Kunci: Social entrepreneurship, Pemberdayaan Ekonomi, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan hukum terkait perlakuan terhadap pelanggar hukum seperti tahanan, anak, dan warga binaan yang terdiri dari narapidana, anak binaan, serta klien, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah mewujudkan reintegrasi sosial, yaitu mengembalikan individu pelanggar hukum agar dapat hidup kembali secara normal di masyarakat melalui proses pembinaan yang menekankan perubahan perilaku, kesadaran moral, serta kemampuan beradaptasi sosial. Sistem ini menolak paradigma pemenjaraan yang bersifat balas dendam dan isolatif, bergeser menjadi sistem rehabilitatif yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan meliputi dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, sebagaimana diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999. Tujuannya agar warga binaan memiliki keterampilan dan kesiapan mental untuk kembali berperan dalam masyarakat setelah bebas, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga bergantung pada peran petugas pemasyarakatan sebagai pendamping langsung, serta dukungan keluarga dan masyarakat yang berperan penting dalam memulihkan rasa percaya diri mantan narapidana.

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan di lapas menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait perbedaan latar belakang sosial-ekonomi warga binaan yang menciptakan dinamika sosial kompleks. Masalah ekonomi menjadi faktor dominan yang sering memicu stres, tekanan psikologis, hingga gangguan keamanan dan ketertiban. Permasalahan utang-piutang di antara narapidana seringkali berkembang menjadi konflik serius seperti adu mulut, perkelahian, bahkan pembunuhan, sebagaimana kasus di Lapas Kelas I Rajabasa yang menyebabkan tewasnya seorang narapidana akibat perselisihan utang-piutang.



Sumber : <https://www.viva.co.id/749551-satu-napi-tewas-di-lapas-rajabasa>

Gambar 1. Polisi meredam kericuhan di lapas rajabasa

Berdasarkan gambar 1.1, permasalahan utang-piutang antar narapidana mencerminkan adanya gangguan ekonomi yang serius di dalam lembaga pemasyarakatan, terutama dialami oleh narapidana dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Faktor utama yang mendorong kondisi tersebut adalah tekanan kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi, sehingga narapidana mencari berbagai cara untuk membantu perekonomian keluarganya dari dalam lapas (Arif & Ritonga, 2024). Tekanan ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada individu narapidana, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosialnya, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Arinda & Rizkillah, 2023). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi yang mampu memperkuat posisi narapidana agar lebih berdaya dan mandiri secara finansial (Permana, 2021).

Pemberdayaan ekonomi bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan dukungan regulasi dari pemerintah (N. Lestari et al., 2021). Dalam konteks pemasyarakatan, pemberdayaan diarahkan agar narapidana dan mantan warga binaan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mencapai kesejahteraan mandiri setelah bebas (Wiradirjaa et al., 2015; Gasela et al., 2021).

Salah satu bentuk konkret pemberdayaan ekonomi di lapas adalah penerapan *social entrepreneurship* atau kewirausahaan sosial, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga pada dampak sosial jangka panjang (Dees, 1998; R. Hidayah et al., 2022). Melalui model ini, narapidana diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan wirausaha, menghasilkan produk bernilai ekonomi, serta memperoleh premi atau upah sebagaimana diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 2022. Program *social entrepreneurship* di lapas berfungsi sebagai sarana pembinaan kemandirian, membentuk motivasi kerja, serta menumbuhkan semangat kompetitif dalam berwirausaha (A. S. Lestari et al., 2021). Dengan adanya pelatihan keterampilan kerja berbasis industri seperti konveksi, garmen, pertanian, dan kerajinan, narapidana tidak hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga bekal mental dan kemampuan praktis untuk hidup mandiri setelah bebas (Safrin, 2021).

Selain itu, pelaksanaan *social entrepreneurship* mendukung tujuan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi sosial (Sitompul, 2024). Salah satu contoh keberhasilan program ini terlihat di Lapas Kelas I Makassar yang mampu memproduksi 1.400 lembar baju seragam mahasiswa hasil program pembinaan kemandirian, menunjukkan dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi warga binaan. Program semacam ini membuktikan bahwa narapidana dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana (M. N. Hidayah & Cahyani, 2024).

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi berbasis *social entrepreneurship* menjadi strategi efektif dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial yang diamanatkan sistem pemasyarakatan Indonesia. Lapas berperan penting tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai wadah transformasi ekonomi dan sosial bagi narapidana. Dalam konteks penelitian ini, Lapas Kelas I Madiun dipilih

sebagai lokasi penelitian karena memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan pemasyarakatan serta jumlah warga binaan yang cukup besar, yaitu 1.134 orang, sehingga dapat merepresentasikan pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi yang diharapkan mampu mewujudkan kemandirian serta kesiapan sosial narapidana pasca-pembebasan.

Jenis Registrasi	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Totals
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
A I				25	2	27
A II				9		9
A III				52	9	61
A IV				3		3
A V				1	1	2
B I		925	19			944
B II A		17	1			18
B III		32				32
Hukuman Mati		3				3
Hukuman Seumur Hidup		35				35
Totals		1,012	20	90	12	1,134

Sumber : <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/> (DitjenPAS, 2025)

Gambar 2. Data Warga Binaan

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, Lapas Kelas I Madiun memiliki lingkungan yang kompleks dan keberagaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di Indonesia program pembinaan yang dilaksanakan pada seluruh Lembaga Pemasyarakatan memiliki perbedaan metode dan keberagaman faktor yang mempengaruhi program tersebut. Faktor geografis dan kondisi ekonomi daerah sangat berpengaruh terkait keberagaman program tersebut. Salah satu unit Lapas yang memiliki berbagai program pembinaan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. Pada Lapas I Madiun terdapat beberapa program pembinaan yang disesuaikan dengan minat dan hasil assesmen narapidana. Keberagaman tersebut untuk mendukung ketepatan program pembinaan agar sesuai dengan tujuan dan berjalan efektif. Oleh karena itu, dari penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pembinaan dengan *Social Entrepreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan realitas sosial yang terjadi di lingkungan Lapas Kelas I Madiun melalui eksplorasi non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena secara rinci tanpa mengubah fakta

yang sebenarnya, serta menekankan pada pemahaman makna di balik peristiwa yang diamati (Sugiyono, 2023; Mely G. Tan dalam Rusli et al., 2014). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Madiun, meliputi pejabat dan petugas lapas sebagai pelaksana kebijakan, narapidana sebagai pelaksana kegiatan kerja, serta pihak ketiga atau mitra kerja sebagai stakeholder pendukung kegiatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, hasil penelitian terdahulu, literatur, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan topik pembinaan kemandirian narapidana. Kombinasi kedua sumber data tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan dan efektivitas program pembinaan di lapas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait di Lapas Kelas I Madiun, seperti pejabat, petugas, narapidana, dan stakeholder untuk memperoleh informasi mendalam tentang pelaksanaan kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship*. Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat aktivitas, interaksi, dan kondisi nyata tanpa mengubah situasi alami. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa laporan, catatan kegiatan, dan dokumen resmi lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan menyusun temuan yang akurat, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Social Entrepreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Keterbatasan ruang gerak yang dialami narapidana di Lapas Kelas I Madiun menjadi akar berbagai permasalahan kompleks, baik secara mental, sosial, maupun ekonomi. Isolasi sosial yang berkepanjangan menimbulkan tekanan psikologis, sementara masalah ekonomi yang tidak tertangani selama masa pidana dapat memperburuk kondisi psikososial narapidana dan menghambat proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial pasca bebas. Untuk mengatasi hal tersebut, Lapas Kelas I Madiun menyelenggarakan berbagai program pembinaan, salah satunya melalui program pembinaan kemandirian berbasis kegiatan kerja dengan konsep *social entrepreneurship*. Program ini dijalankan melalui beberapa POKJA (Kelompok Kerja) yang beranggotakan narapidana sesuai hasil asesmen minat dan bakat. Melalui kegiatan kerja yang inovatif dan terarah, narapidana tidak hanya dilatih keterampilan teknis, tetapi juga ditanamkan nilai kemandirian ekonomi dan tanggung jawab sosial.

Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun. Observasi dilakukan untuk melihat perilaku dan perubahan yang terjadi selama kegiatan, sedangkan wawancara

dilakukan guna memperkuat hasil pengamatan dan memperoleh informasi mendalam terkait pelaksanaan program, pemberdayaan ekonomi, serta kendala yang dihadapi. Berdasarkan analisis, penerapan teori *social entrepreneurship* dari Dees (1998) menunjukkan bahwa kegiatan ini mencerminkan dimensi penting seperti agen perubahan sosial, penciptaan nilai sosial, pemanfaatan peluang, serta inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun berperan signifikan dalam membangun kemandirian, memperkuat kepercayaan diri, dan menyiapkan narapidana untuk kembali berkontribusi positif di masyarakat setelah bebas.

a. Dimensi Agen Perubahan Sosial

Dimensi agen perubahan sosial dalam teori *social entrepreneurship* menekankan pentingnya transformasi sosial yang kompleks, mencakup perubahan pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial individu atau kelompok. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun terbukti membawa perubahan signifikan terhadap perilaku dan sikap narapidana. Narapidana menunjukkan peningkatan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, serta partisipasi aktif dalam kelompok kerja. Mereka tidak hanya menjalankan tugas secara pasif, tetapi juga berinisiatif menjaga kualitas dan ketepatan waktu hasil produksi. Hal ini sejalan dengan pernyataan petugas pembinaan yang menyebutkan bahwa program tersebut mampu menumbuhkan motivasi, semangat kerja, serta kedisiplinan narapidana melalui rutinitas positif seperti apel pagi dan pembagian tanggung jawab kerja.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan antusiasme tinggi narapidana dalam mengikuti pelatihan kerja yang rutin dilaksanakan. Antusiasme ini mencerminkan kesadaran mereka untuk memperbaiki diri, membangun etos kerja, dan mengembangkan keterampilan sebagai bekal setelah bebas. Program ini juga berdampak pada aspek psikologis, di mana narapidana merasa lebih tenang, tidak jenuh, dan memiliki aktivitas bermakna yang mengurangi stres selama menjalani pidana. Wawancara dengan narapidana memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa kegiatan *social entrepreneurship* menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan semangat baru karena mereka merasa memiliki peran nyata dalam proses pembinaan. Dengan demikian, kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelatihan keterampilan, tetapi juga sebagai bentuk intervensi sosial dan psikologis yang efektif. Program ini berhasil membentuk karakter positif, meningkatkan stabilitas emosi, mengurangi kejenuhan, serta mendorong terbentuknya kebiasaan disiplin dan produktif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini telah memenuhi dimensi agen perubahan sosial, karena mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku narapidana secara berkelanjutan menuju reintegrasi sosial yang lebih baik.

b. Dimensi Adopsi misi untuk menciptakan nilai sosial

Dimensi adopsi misi untuk menciptakan nilai sosial dalam teori *social entrepreneurship* berfokus pada penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan bagi pelaku usaha, bukan semata mengejar keuntungan ekonomi. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara di Lapas Kelas I Madiun, kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* terbukti memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi narapidana. Melalui kegiatan ini, narapidana memperoleh pelatihan keterampilan kerja seperti menjahit, pertanian, dan pengolahan hasil kerja, yang bertujuan agar mereka memiliki keahlian dan tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Peningkatan keterampilan ini menjadi bentuk nyata dari penciptaan nilai sosial karena memberikan peluang bagi narapidana untuk hidup mandiri, produktif, dan berkontribusi secara positif setelah reintegrasi ke masyarakat.

Selain memberikan pelatihan, kegiatan ini juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi narapidana melalui sistem *premi* atau insentif hasil kerja. Premi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menjalani pidana, seperti perlengkapan mandi atau mencuci pakaian, serta menjadi modal awal setelah bebas untuk membuka usaha atau mencari pekerjaan. Wawancara dengan petugas dan narapidana menunjukkan bahwa premi dan keterampilan yang diperoleh membantu mengurangi tekanan ekonomi, meningkatkan motivasi kerja, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Bagi narapidana yang jauh dari keluarga, pendapatan kecil ini bahkan membantu meringankan beban ekonomi keluarga di luar lapas.

Produk-produk hasil karya narapidana seperti konveksi dan hasil pertanian juga memiliki nilai jual, tidak hanya di lingkungan internal lapas, tetapi berpotensi menembus pasar eksternal. Hal ini memperluas jejaring sosial dan ekonomi narapidana, sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri mereka sebagai individu yang mampu berdaya. Dengan demikian, kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun bukan hanya sarana pembinaan, tetapi juga wadah transformasi sosial dan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan hidup narapidana. Berdasarkan temuan penelitian, kegiatan ini secara nyata memenuhi dimensi adopsi misi untuk menciptakan nilai sosial, karena mampu menghasilkan dampak jangka panjang berupa peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, dan kesiapan reintegrasi sosial narapidana. Melalui pemberian pelatihan dan premi, program ini menciptakan nilai sosial yang mendalam dan berkelanjutan, mendukung misi utama pasyarakatan dalam membentuk narapidana yang produktif, mandiri, dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

c. Dimensi Memanfaatkan Peluang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun menunjukkan implementasi nyata dari dimensi memanfaatkan peluang dalam teori *social entrepreneurship*. Dimensi ini menekankan pentingnya kemampuan mengubah keterbatasan menjadi peluang yang bernilai ekonomi dan sosial. Lapas Kelas I Madiun berhasil memanfaatkan keterbatasan sumber daya internal dengan menjalin kerja sama strategis bersama pihak ketiga, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), pengusaha, dan lembaga pelatihan. Kolaborasi ini tidak hanya menyediakan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar, tetapi juga memperluas akses narapidana terhadap jaringan usaha eksternal. Dengan

demikian, kegiatan kerja di Lapas tidak sekadar menjadi rutinitas pembinaan, melainkan sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui kerja sama tersebut, narapidana memperoleh keterampilan praktis dalam berbagai bidang seperti konveksi, kuliner, dan produksi kreatif. Pelatihan dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan kemampuan dan minat narapidana, serta difasilitasi oleh tenaga ahli dari mitra kerja. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga juga membantu mengatasi keterbatasan SDM petugas lapas dalam memberikan pelatihan teknis. Dampak jangka panjang dari program ini terlihat dari narapidana yang mampu membuka usaha mandiri setelah bebas, seperti usaha tempe hasil dari pembinaan kerja di lapas. Pihak BLK menilai program ini sebagai langkah strategis dalam menciptakan kesejahteraan warga binaan, karena memberikan kesempatan untuk tetap produktif meski berada dalam masa pidana.

Secara keseluruhan, kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun telah memenuhi dimensi memanfaatkan peluang, dengan menjadikan keterbatasan sumber daya sebagai pendorong inovasi dan kolaborasi. Melalui jaringan kemitraan dan pelatihan berkelanjutan, program ini menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang nyata, membentuk kemandirian narapidana, serta membuka peluang keberlanjutan hidup pasca-pembebasan.

d. Dimensi Proses Inovasi, Adaptasi, dan Pembelajaran Berkelanjutan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, pelaksanaan kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun menunjukkan penerapan nyata dari dimensi Proses Inovasi, Adaptasi, dan Pembelajaran Berkelanjutan dalam teori *social entrepreneurship*. Dimensi ini menekankan pentingnya pendekatan kreatif dan adaptif untuk mencapai keberhasilan pembinaan sosial dan ekonomi narapidana. Petugas Lapas Kelas I Madiun menerapkan berbagai inovasi pendekatan interpersonal dan humanis untuk menarik minat serta meningkatkan partisipasi aktif narapidana dalam kegiatan kerja. Pendekatan persuasif dilakukan dengan metode komunikasi dari hati ke hati, di mana petugas berupaya memahami latar belakang, kendala, serta kebutuhan psikologis narapidana. Pendekatan ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menumbuhkan motivasi internal agar narapidana mau terlibat secara sukarela dan berkomitmen dalam kegiatan pembinaan.

Selain itu, pendekatan inovatif juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan asesmen sejak masa mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Pada tahap ini, petugas memperkenalkan berbagai program kerja dan melakukan pemetaan minat serta bakat narapidana melalui asesmen, sehingga mereka dapat ditempatkan pada kelompok kerja (pokja) yang sesuai dengan keterampilan dan potensi masing-masing. Pendekatan ini memperkuat efektivitas pembinaan karena kegiatan kerja dijalankan secara relevan dan berorientasi pada keberlanjutan. Petugas juga menerapkan "paksaan positif" melalui edukasi tentang manfaat kegiatan kerja terhadap hak-hak integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB), sehingga narapidana lebih memahami nilai strategis keterlibatan mereka dalam program.

Inovasi lain yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan lomba dan aktivitas motivasional, seperti kompetisi olahraga atau karaoke di antara kelompok kerja. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana rekreatif sekaligus pembentuk semangat kerja, tanggung jawab, dan kreativitas narapidana. Melalui lomba, narapidana didorong untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka dan belajar bekerja dalam suasana kompetitif yang sehat. Seluruh pendekatan ini membuktikan bahwa Lapas Kelas I Madiun telah mengembangkan strategi pembinaan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis inovasi, adaptasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun tidak sekadar berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membangun aspek psikologis, sosial, dan motivasional narapidana. Pendekatan kreatif yang dilakukan petugas menjadi faktor kunci keberhasilan program, karena mampu menciptakan suasana pembinaan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Hambatan dalam pelaksanaan Social entrepreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

a. Kurangnya kesadaran narapidana

Selama observasi, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun menghadapi hambatan yang bersumber dari rendahnya kesadaran, baik dari narapidana maupun sebagian petugas, terhadap tujuan strategis program tersebut. Kegiatan kerja yang seharusnya menjadi sarana pembinaan kemandirian dan persiapan reintegrasi sosial sering kali dipersepsikan hanya sebagai rutinitas tanpa pemahaman akan manfaat jangka panjangnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas, diketahui bahwa narapidana kasus narkoba umumnya menunjukkan tingkat motivasi yang lebih rendah dibandingkan narapidana kasus kriminal lain, karena cenderung memiliki sifat pasif dan kurang disiplin.

Hal ini membuat pendekatan pembinaan terhadap kelompok tersebut memerlukan upaya ekstra dari petugas. Meskipun pada awalnya banyak narapidana yang antusias mengikuti kegiatan kerja karena ingin belajar keterampilan baru, semangat tersebut sering kali menurun seiring waktu akibat rutinitas yang monoton dan minimnya pemahaman terhadap nilai ekonomi maupun sosial dari kegiatan yang dijalankan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi serta produktivitas yang diharapkan dalam program berbasis *social entrepreneurship*. Menyadari hal tersebut, pihak Lapas secara bertahap melakukan pendekatan ulang dengan memberikan pemahaman mengenai makna dan manfaat kegiatan kerja bagi kesiapan hidup setelah bebas. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi internal narapidana agar terlibat bukan karena kewajiban administratif, tetapi karena kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut sebagai investasi pembinaan menuju kemandirian dan reintegrasi sosial yang bermartabat.

b. Kurangnya SDM Petugas

Dalam pelaksanaan program kerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun, petugas memiliki peran sentral sebagai pengawas, pembimbing, sekaligus fasilitator dalam menjamin keberhasilan kegiatan pembinaan. Namun, keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi hambatan struktural yang cukup serius. Rasio antara petugas dan narapidana yang tidak seimbang menyebabkan satu petugas sering kali harus menangani hingga tiga kelompok kerja (*pokja*) sekaligus. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya efektivitas pengawasan, bimbingan, dan kualitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa petugas kerap merangkap tanggung jawab di beberapa *pokja* karena kekurangan personel serta adanya kebutuhan lembaga untuk menugaskan mereka pada kegiatan lain, seperti pelayanan kunjungan, administrasi, atau kegiatan operasional mendesak.

Situasi tersebut membuat proses pembinaan menjadi kurang konsisten dan mengurangi kesempatan bagi narapidana untuk mendapatkan pendampingan keterampilan yang intensif. Meski demikian, para petugas tetap berupaya menjalankan tugas sebaik mungkin dengan membagi waktu dan tanggung jawab secara proporsional agar kegiatan kerja tetap berjalan. Hambatan ini menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui penambahan jumlah petugas, peningkatan kapasitas, serta penerapan sistem kerja yang lebih efisien. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melibatkan narapidana berpengalaman sebagai mentor internal untuk membantu proses pembinaan. Dengan perbaikan sistem dan evaluasi alokasi tenaga kerja yang tepat, pelaksanaan program berbasis *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun diharapkan dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi proses rehabilitasi serta pemberdayaan narapidana.

c. *Maintenance* alat yang susah dan sulit

Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan kerja kewirausahaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun menjadi strategi penting untuk memperkuat efektivitas program pembinaan kemandirian. Integrasi teknologi dilakukan untuk meningkatkan keterampilan narapidana agar mampu beradaptasi dengan perkembangan industri modern serta bekerja secara lebih efisien dan produktif. Melalui penggunaan alat dan mesin yang relevan, kegiatan kerja di lapas diharapkan tidak hanya menjadi sarana pembinaan, tetapi juga pengalaman praktik yang mendekati dunia kerja nyata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian dan perawatan alat, serta belum meratanya pelatihan teknologi di seluruh kelompok kerja (*pokja*). Dalam observasi ditemukan beberapa peralatan yang membutuhkan perawatan teknis khusus sering kali mengalami kerusakan, sehingga menghambat jalannya program dan menurunkan efektivitas pembinaan.

Hambatan ini diperparah dengan minimnya petugas yang memiliki kompetensi teknis, sehingga proses perbaikan dan pemeliharaan alat sering tertunda. Selain itu, belum adanya sistem manajemen aset yang terstruktur menyebabkan pengawasan dan jadwal perawatan tidak berjalan optimal,

berpotensi menurunkan kualitas produksi dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas teknis petugas melalui pelatihan, penambahan tenaga ahli, serta kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendukung aspek pemeliharaan alat. Upaya ini penting agar penggunaan teknologi dapat berjalan berkelanjutan dan benar-benar berkontribusi terhadap pembinaan kemandirian narapidana yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial.

d. Sarana Prasarana masih belum optimal

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kondisi peralatan di unit kerja meubel Lapas Kelas I Madiun yang masih menggunakan alat manual dan tergolong sederhana. Berdasarkan hasil observasi, keterbatasan teknologi dan sarana produksi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas serta kualitas hasil kerja narapidana. Meskipun kegiatan meubel tetap berjalan sesuai prosedur, proses produksi yang mengandalkan tenaga manusia sepenuhnya membuat pekerjaan memakan waktu lebih lama dan menghasilkan mutu produk yang kurang konsisten. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan yang menjelaskan bahwa fasilitas pada unit meubel masih jauh dari memadai, terutama dalam ketersediaan mesin kayu dan peralatan pendukung lainnya. Minimnya penggunaan alat modern berdampak langsung pada efisiensi, presisi, dan daya saing produk di pasaran, mengingat hasil produksi berupa perabotan rumah tangga dan kerajinan tangan yang menuntut kualitas tinggi. Selain menurunkan produktivitas, kondisi ini juga membatasi kesempatan narapidana untuk belajar menggunakan teknologi semi-industri yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern. Oleh karena itu, modernisasi sarana dan peningkatan dukungan teknologi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan kewirausahaan sosial di lapas, agar narapidana memperoleh keterampilan yang lebih aplikatif, adaptif, dan mampu bersaing setelah bebas nantinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berjudul "*Social Entrepreneurship* dalam Pemberdayaan Ekonomi Narapidana di Lapas Kelas I Madiun", dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kewirausahaan sosial melalui kegiatan kerja telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya beberapa dimensi teori *social entrepreneurship*, seperti adanya peran sebagai agen perubahan sosial, penerapan misi untuk menciptakan nilai sosial, kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan peluang, serta penerapan inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Program ini memberikan dampak positif yang nyata bagi narapidana, baik dari segi perilaku, sikap, maupun kebiasaan sehari-hari. Melalui kegiatan kerja berbasis *social entrepreneurship*, narapidana menjadi lebih mandiri secara ekonomi, memiliki rasa tanggung jawab, dan tumbuh kepedulian sosial. Selain itu, sistem premi yang diberikan turut mendukung pemberdayaan ekonomi mereka, mengurangi beban finansial, serta meningkatkan rasa percaya diri. Kegiatan ini juga membantu menekan kejenuhan, menstabilkan emosi, dan menumbuhkan pola hidup yang lebih disiplin dan produktif. Dengan demikian, pelaksanaan *social entrepreneurship* di Lapas Kelas I Madiun mampu memberdayakan narapidana untuk memecahkan

permasalahan ekonomi yang dihadapi, sekaligus menyiapkan mereka menuju kemandirian setelah bebas.

Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran sebagian narapidana terhadap pentingnya kegiatan kerja sebagai bekal masa depan, terutama bagi mereka yang berasal dari kasus narkoba yang cenderung mudah kehilangan motivasi akibat rutinitas monoton. Dari sisi struktural, keterbatasan jumlah petugas menjadi tantangan karena satu orang sering kali harus menangani beberapa unit kerja sekaligus, bahkan merangkap tugas administrasi dan pelayanan lainnya. Kondisi ini menyebabkan pembinaan dan pengawasan tidak berjalan optimal. Hambatan teknis juga muncul akibat sulitnya perawatan alat produksi, minimnya tenaga ahli, serta belum adanya sistem perawatan rutin, sehingga proses produksi sering terhambat ketika alat rusak. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya di unit meubel, membuat kegiatan kerja kurang efisien dan hasil produksi belum memenuhi standar industri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM petugas, pelatihan teknis bagi narapidana, kerja sama dengan mitra eksternal, serta modernisasi peralatan dan fasilitas agar pelaksanaan *social entrepreneurship* benar-benar efektif dalam membentuk narapidana yang terampil, mandiri, dan siap berkontribusi positif di masyarakat setelah bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H., Hukum, F., & Mada, U. G. (2015). Urgensi penggolongan narapidana dalam. 9(1), 49-60.
- Arif, M., & Ritonga, R. (2024). Implikasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 terhadap kedisiplinan warga binaan (studi praktik hutang-piutang antar warga binaan pada Lapas Kelas IIB Kualasimpang). 7(2), 261-274.
- Arinda, F., & Rizkillah, R. (2023). Pengaruh tekanan ekonomi dan dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga narapidana. 10(April), 1-13.
- Bornstein, D. (2007). *How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas*.
- Bornstein, D., & Davis, S. (2010). *Social entrepreneurship: What everyone needs to know*.
- Certo, S. T., & Miller, T. (2008). Social entrepreneurship: Key issues and concepts. *Business Horizons*, 51(4), 267-271. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2008.02.009>
- Darwis, R. S., Saffana, S. R., Miranti, Y., & Yuandina, S. (2022). Kewirausahaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. 4(2), 135-147.
- Deanisa, P., Anggrainy, L. M., Febriyanti, M., & Ludiana, T. (2024). Peranan lembaga pemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam membantu proses reintegrasi sosial narapidana. *Nusantara Journal*, 2023, 1-15.
- Dees, J. G. (1998). *The meaning of "social entrepreneurship"*.
- Dees, J. G., & Smith, A. (2008). Philanthropy and enterprise: Harnessing the power of business and social entrepreneurship for development. *Innovations*, 3(2), 119-132.

- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan peran pemerintah*.
- DitjenPAS. (2025). *Sistem Database Pemasyarakatan Publik*. Ditjenpas.Go.Id. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>
- Gasela, Y., Sujadmi, & Febriani, L. (2021). Pemberdayaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang. *1*, 654–661.
- Hidayah, M. N., & Cahyani, R. R. (2024). Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan social entrepreneurship. *13*(2), 86–94.
- Hidayah, R., Suryandari, D., Suryarini, T., & Rohmah, F. T. (2022). Social entrepreneurship sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. *2*(5), 537–545.
- Lestari, A. S., Fernandes, H., Butar, B., & Juaini, M. (2021). Pengaruh pelatihan dan motivasi berwirausaha terhadap minat dan potensi narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, *5*(2), 440–452. <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i2.4697>
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Oktariani, N. (2021). Teori pembangunan ekonomi. *2*(2), 113–128.
- Muhammad, M. M. (2020). Social entrepreneurship mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip. *2*, 68–78.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook*.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (1999).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (1999).
- Permana, A. F. (2021). Konseptualisasi strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *1*(1), 13–27.
- Perdani, D., & Puspita, Y. (2021). Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan. *Volksgeist*, *4*(1), 85–99. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4352>
- Rusli, M., Pendidikan, D., & Timur, L. (2014). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *1*, 1–13.
- Safrin, F. M. (2021). Pemenuhan hak asasi manusia dalam program pembinaan kemandirian narapidana perempuan di era normal baru. *4*(2), 285–304.
- Sitompul, Y. F. (2024). Collaborative governance dalam pembinaan kemandirian mebel di Lapas Kelas IIA Binjai. *4*(1), 3181–3190.
- Sobarna, A. (2003). Konsep pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin perkotaan. *XIX*(3), 316–329.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, *9*(2), 57–65.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Suyono, H. (2023). *Social entrepreneurship*. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022).
- Yuyun Nurfalah, S. S. (2016). *Apa itu kewirausahaan sosial?*
- Zannara, D. I., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Mekanisme pemberian upah dalam lingkup pemasyarakatan. *4*, 3367–3371.